



**Judul** : DPR Kecam Penyadapan Inggris  
**Tanggal** : Jumat, 21 Juni 2013  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 2

# DPR Kecam Penyadapan Inggris

■ Muhammad Akbar Wijaya

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam tindakan penyadapan yang dilakukan Pemerintah Inggris terhadap sejumlah delegasi negara dalam pertemuan G-20 di London pada April dan September 2009. Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam pertemuan itu. Kedatangan Indonesia ke pertemuan G-20 dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai, tindak penyadapan tidak lazim dilakukan Inggris. Sebab, Inggris selama ini merupakan negara sahabat Indonesia. "Penyadapan mungkin lazim, tapi menjadi tak lazim bila dilakukan antara kedua negara bersahabat," kata Tjahjo ketika dihubungi *Republika*, Kamis (20/6).

Tjahjo menyatakan, Indonesia tak memiliki masalah dengan Pemerintah Inggris. Kedua negara bahkan kerap berkoordinasi soal informasi intelijen. "Hubungan koordinasi jaringan intelijen kedua negara sudah terkoordinasi baik," ujarnya.

Pemerintah Indonesia tidak boleh mengangap remeh kejadian ini. Tjahjo menyatakan, Pemerintah Indonesia mesti melayangkan surat ke Pemerintah Inggris untuk mempertanyakan aksi penyadapan yang mereka lakukan. "Permintaan penjelasan saya kira dengan tertulis akan lebih baik agar terdokumentasi," katanya.

Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, klarifikasi lisan yang diberikan Kementerian Luar Negeri Indonesia hanya berguna untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua negara. Namun, bila ingin menunjukkan keseriusan, Pemerintah Indonesia mesti menyertai permintaan klarifikasi tertulis. "Klarifikasi tertulis menunjukkan pemerintah 'serius' terkait masalah tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene meminta penjelasan Pemerintah Inggris terkait kegiatan mata-mata (*spionase*) yang dilakukan intelijen Inggris terhadap delegasi KTT G-20, termasuk Indonesia.

Dia menilai, penjelasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman. "Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua negara," kata Tene. Permintaan penjelasan tersebut hanya melalui lisan, tidak melalui surat tertulis.

Informasi tentang *spionase* intelijen Inggris terungkap lewat surat kabar *The Guardian*. Dalam laporannya, Senin (18/6), *The Guardian* menulis Pemerintah Inggris memerintahkan penyadapan terhadap setiap komunikasi internet dan panggilan telepon anggota delegasi G-20.

■ ed: abdullah sammy